

ANALISIS KEBUTUHAN MEDIA SOSIALISASI PENDIDIKAN PEMILIH BAGI PENYANDANG DISABILITAS UNTUK MENINGKATKAN PARTISIPASI POLITIK DI KABUPATEN BANTUL

Nailan Sofiah Siregar¹, Alfian Muhazir², Herlambang Jati Kusumo³

Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ekonomi, Ilmu Sosial dan Humaniora, Universitas

'Aisyiyah Yogyakarta, Yogyakarta

nailansiregar11@gmail.com, alfianmuhazir@unisayogya.ac.id,

herlambangjatikusumo@unisayogya.ac.id

Submitted: 1 Juli 2026,

Accepted: 20 Juli 2026,

Published: 30 Juli 2026

ABSTRAK

Berdasarkan data rekapitulasi partisipasi pemilih penyandang disabilitas yang dihimpun Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bantul pada Pemilu 2024, tingkat partisipasi pemilih disabilitas tercatat hanya berkisar 32,42–33,00% untuk seluruh jenis pemilihan, jauh di bawah target partisipasi pemilih disabilitas yang ditetapkan KPU sebesar 85–100%. Rendahnya angka tersebut diduga berkaitan dengan belum terpenuhinya kebutuhan media sosialisasi pendidikan pemilih yang sesuai dengan karakteristik komunikasi setiap ragam disabilitas. Penelitian ini bertujuan menganalisis kebutuhan media sosialisasi pendidikan pemilih bagi penyandang disabilitas di Kabupaten Bantul, mengidentifikasi kesesuaian media yang telah digunakan KPU dengan karakteristik ragam disabilitas, serta merumuskan rekomendasi media yang lebih aksesibel. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan desain studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi terhadap delapan informan dari komunitas CIQAL dan HIDIMU Bantul serta KPU Kabupaten Bantul, kemudian dianalisis menggunakan model interaktif Miles dan Huberman dan diuji keabsahannya melalui triangulasi sumber dan teknik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebutuhan media berbeda secara signifikan antarragam disabilitas. Penyandang netra total membutuhkan media audio yang kompatibel dengan TalkBack dan terhambat oleh format running text, sementara penyandang netra ringan masih dapat mengandalkan media berbasis teks namun menghadapi hambatan aksesibilitas fisik di Tempat Pemungutan Suara (TPS). Penyandang Tuli/Rungu membutuhkan Juru Bahasa Isyarat (JBI) dan subtitle terstruktur; penyandang fisik/daksa lebih membutuhkan pemenuhan aksesibilitas fisik daripada adaptasi media; penyandang psikologis memerlukan pendekatan berjenjang sesuai tingkat keparahan; dan penyandang intelektual membutuhkan media bergambar sederhana dengan pendampingan. Penelitian ini juga menemukan bahwa komunitas difabel menjadi saluran informasi paling efektif, namun berisiko menciptakan eksklusif bagi yang tidak berorganisasi, serta bahwa rendahnya partisipasi lebih disebabkan oleh hambatan struktural daripada rendahnya motivasi pemilih. Rekomendasi utama penelitian ini adalah pengembangan video inklusif satu format untuk semua yang memadukan audio, visual, teks, dan JBI secara bersamaan.

Kata-kata Kunci: media sosialisasi; pendidikan pemilih; penyandang disabilitas; partisipasi politik; aksesibilitas

Voter Education Media Needs for Persons with Disabilities in Bantul Regency

ABSTRACT

Based on the official voter-participation recapitulation data compiled by the General Election Commission (KPU) of Bantul Regency for the 2024 General Election, the participation rate of voters with disabilities was recorded at only 32.42–33.00% across all election categories, far below the KPU's target of 85–100%. This low rate is presumed to relate to the unmet needs for voter education socialization media suited to the communication characteristics of each disability type. This study aims

to analyze the needs for voter education socialization media among persons with disabilities in Bantul Regency, identify the suitability of media already used by the KPU with the characteristics of each disability type, and formulate recommendations for more accessible media. The study used a qualitative method with a case study design. Data were collected through in-depth interviews, observation, and documentation involving eight informants from the CIQAL and HIDIMU Bantul communities and the Bantul Regency KPU, then analyzed using the Miles and Huberman interactive model, with validity ensured through source and technique triangulation. The results show that media needs differ significantly across disability types. Totally blind voters need TalkBack-compatible audio media and are hindered by running-text formats, while low-vision voters can still rely on text-based media but face physical accessibility barriers at polling stations. Deaf/hard-of-hearing voters need sign language interpreters and structured subtitles; physically disabled voters need physical accessibility more than media adaptation; voters with psychological disabilities require a tiered approach based on severity; and voters with intellectual disabilities need simple pictorial media with companionship. The study also found that disability communities serve as the most effective information channel, yet risk excluding unorganized individuals, and that low participation stems more from structural barriers than from low voter motivation. The main recommendation is the development of an inclusive one-format-for-all video that simultaneously combines audio, visuals, text, and sign language interpretation.

Keywords: socialization media; voter education; persons with disabilities; political participation; accessibility

Korespondensi: Nailan Sofiah Siregar. Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ekonomi, Ilmu Sosial dan Humaniora, Universitas 'Aisyiyah Yogyakarta. Jl. Siliwangi (Ring Road Barat) No. 63, Mlangi, Nogotirto, Gamping, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, 55292. Email: nailansiregar11@gmail.com

PENDAHULUAN

Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan pilar utama demokrasi di Indonesia karena menjadi sarana penyaluran kedaulatan rakyat sekaligus indikator efektivitas sistem politik dalam mewujudkan aspirasi masyarakat (Kaharu et al., 2025). Prinsip kesetaraan dan non-diskriminasi dalam pemilu ditegaskan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, sehingga partisipasi politik penyandang disabilitas merupakan kewajiban konstitusional negara, bukan kebijakan tambahan (Husin et al., 2023).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas membedakan ragam disabilitas atas disabilitas fisik, intelektual, mental, dan sensorik, yang menunjukkan bahwa setiap penyandang disabilitas memiliki karakteristik dan kebutuhan akses informasi politik yang berbeda (Fatimah, 2020). Dalam praktiknya, penyandang disabilitas masih menghadapi hambatan fisik, sosial, dan teknis yang membatasi partisipasi mereka secara setara (Herman & Adnan, 2024).

Data Badan Pengawas Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta menunjukkan jumlah pemilih penyandang disabilitas dalam Daftar Pemilih Tetap Pemilu 2024 mencapai 30.503 orang, dengan 6.860 pemilih berada di Kabupaten Bantul. Namun, besarnya jumlah

tersebut belum menjamin partisipasi politik yang optimal, karena rendahnya partisipasi pemilih difabel tidak hanya berkaitan dengan aspek administratif, tetapi juga keterbatasan akses informasi dan belum optimalnya strategi sosialisasi inklusif (Amrurobbi et al., 2021 . Rengganis et al., 2021). Data resmi rekapitulasi partisipasi pemilih penyandang disabilitas yang dihimpun KPU Kabupaten Bantul pada Pemilu 2024 menunjukkan tingkat partisipasi sebesar 33,00% pada pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, 33,00% pada pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), 33,00% pada pemilihan Dewan Perwakilan Daerah (DPD), 32,51% pada pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi, dan 32,42% pada pemilihan DPRD Kabupaten/Kota, sehingga secara keseluruhan berkisar pada rentang 32,42–33,00% untuk seluruh jenis pemilihan jauh di bawah target partisipasi pemilih disabilitas yang ditetapkan KPU sebesar 85–100% (KPU Kabupaten Bantul, 2024).

Materi sosialisasi pemilu dilaporkan masih sulit dipahami karena bahasa yang kompleks dan belum tersedianya format yang aksesibel bagi semua ragam disabilitas (Galih Priatmojo, 2025). KPU Kabupaten Bantul telah menyosialisasikan pendidikan pemilih melalui komunitas disabilitas hingga tingkat kapanewon dan kalurahan, termasuk menghadirkan interpreter bahasa isyarat dan memproduksi konten audio visual bersubtitle, tetapi kesesuaiannya dengan kebutuhan komunikasi setiap ragam disabilitas belum dapat dipastikan.

Penelitian terdahulu telah mengkaji aksesibilitas, hambatan partisipasi, dan strategi sosialisasi inklusif bagi pemilih disabilitas (Alemande et al., 2024; Yudha Alam et al., 2024), namun kajian yang secara khusus menganalisis kebutuhan media sosialisasi berdasarkan karakteristik komunikasi setiap ragam disabilitas dalam konteks lokal Kabupaten Bantul masih terbatas. Penelitian ini diposisikan untuk mengisi kesenjangan tersebut dengan bersandar pada teori sosialisasi politik, teori partisipasi politik, dan peran komunikasi politik penyelenggara pemilu, yang secara bersama-sama menegaskan bahwa efektivitas pendidikan pemilih bergantung pada kesesuaian antara media, format, dan saluran komunikasi dengan karakteristik kebutuhan penerima pesan.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis kebutuhan media sosialisasi pendidikan pemilih bagi penyandang disabilitas di Kabupaten Bantul, mengidentifikasi kesesuaian media yang telah digunakan KPU dengan karakteristik setiap ragam disabilitas, serta merumuskan rekomendasi media yang lebih aksesibel guna mendorong partisipasi politik pemilih disabilitas.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus untuk mengkaji secara mendalam kebutuhan, preferensi, dan hambatan akses komunikasi penyandang disabilitas terhadap media sosialisasi pendidikan pemilih di Kabupaten Bantul. Pendekatan ini dipilih karena analisis kebutuhan media memerlukan pemahaman terhadap makna, persepsi, dan pengalaman informan sebagai pemilih (Putra, 2025).

Penelitian dilaksanakan di Kabupaten Bantul pada bulan Maret–April 2026, melibatkan delapan informan yang ditentukan secara purposive sebagaimana disajikan pada Tabel 1. Identifikasi ragam disabilitas mengacu pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Tabel 1. Profil Informan Penelitian

No.	Nama	Ragam Disabilitas	Keterangan/Afiliasi
1	Supri	Netra total	Anggota HIDIMU Bantul
2	Bekti	Netra ringan (low vision)	Anggota HIDIMU Bantul
3	Nur	Tuli/Rungu	Anggota HIDIMU Bantul
4	Dwi	Fisik/daksa	Anggota CIQAL
5	Dita	Psikologis	Pemilih pertama Pemilu 2024, luar komunitas
6	Yono	Fisik/daksa	Anggota HIDIMU Bantul
7	Andi	–	Ketua HIDIMU Bantul, informan kunci
8	Wuri Rahmawati	–	Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan SDM KPU Kabupaten Bantul (selanjutnya disebut Wuri), informan pendukung dari unsur penyelenggara pemilu

Peneliti tidak berhasil menjangkau informan penyandang disabilitas intelektual secara langsung karena pertimbangan etis terhadap perlindungan kelompok rentan, ketidaktersediaan pendamping berwenang, dan keterbatasan akses ke panti atau komunitas terkait di Kabupaten Bantul selama periode penelitian. Data mengenai ragam disabilitas ini diperoleh dari sumber sekunder, yaitu keterangan Andi, Wuri, guru Sekolah Luar Biasa (SLB), dan orang tua pendamping, diperkuat dengan kajian literatur pendekatan yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan dalam penelitian kualitatif (Sugiyono, 2020).

Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi (Putri & Murhayati, 2025). Observasi dilakukan terhadap pelaksanaan sosialisasi pemilu dan aksesibilitas informasi di lapangan. Wawancara mendalam digunakan untuk menggali pengalaman, kebutuhan, dan harapan informan terhadap media sosialisasi yang aksesibel; khusus informan Tuli/Rungu, wawancara dilakukan melalui instrumen pertanyaan tertulis.

Dokumentasi melengkapi data melalui laporan kegiatan, data pemilih disabilitas, dan bahan publikasi KPU.

Keabsahan data diuji melalui triangulasi sumber dan triangulasi teknik (Sugiyono, 2020). yaitu membandingkan informasi antarinforman serta antara hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, dan diperkuat dengan member check kepada informan. Analisis data menggunakan model interaktif Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi, dilakukan secara siklus hingga data dianggap jenuh.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebutuhan media sosialisasi pendidikan pemilih berbeda secara signifikan antarragam disabilitas dan tidak dapat diseragamkan dalam satu format tunggal. Pada penyandang disabilitas netra, penelitian melibatkan dua informan dengan tingkat ketajaman penglihatan berbeda, yaitu Supri (netra total) dan Bkti (netra ringan/*low vision*). Bagi keduanya, keterlibatan dalam komunitas HIDIMU Bantul menjadi jalur utama memperoleh informasi pemilu, karena KPU menyalurkan informasi kepada komunitas yang kemudian diteruskan kepada anggota melalui media sosial. Bkti juga memperoleh informasi langsung dari sosialisasi KPU Kabupaten Bantul dan pesan WhatsApp warga, serta menilai substansi informasi yang diterimanya sudah cukup mudah dipahami; hambatan yang dihadapinya justru terletak pada aksesibilitas fisik, khususnya jalur masuk Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang belum sepenuhnya ramah bagi penyandang netra.

Hambatan utama yang dihadapi Supri berkaitan dengan format penyajian informasi digital, yaitu penggunaan *running text* pada video sosialisasi yang tidak dapat terbaca oleh aplikasi pembaca layar (*screen reader*) seperti *TalkBack*, sehingga informasi pada teks tersebut tidak sepenuhnya dapat diakses oleh penyandang netra total meski narasi audionya tetap dapat didengar. Wuri mengakui keterbatasan ini dan menjelaskan bahwa surat suara braille hanya disediakan untuk kategori pemilihan Presiden/Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia, sementara tidak semua penyandang netra mampu membaca huruf braille. Sebagai solusi, Wuri mengusulkan format video yang dinarasikan, yakni video yang memadukan narasi suara, teks, dan gambar secara bersamaan agar dapat menjangkau seluruh kelompok disabilitas tanpa memisahkan kanal informasi, serta dapat didistribusikan melalui YouTube, Instagram, dan TikTok. Bkti menambahkan bahwa media sosial berbasis teks seperti WhatsApp dan Facebook sudah memadai baginya karena sisa penglihatannya masih memungkinkan akses teks dengan pembesaran huruf, berbeda dengan netra total yang sepenuhnya bergantung pada audio dan pembaca layar.

Temuan ini menunjukkan bahwa kebutuhan media bagi disabilitas netra bergradasi sesuai tingkat ketajaman penglihatan: netra total membutuhkan media audio yang kompatibel dengan pembaca layar dan bebas elemen visual yang tidak terbaca seperti *running text*, sedangkan netra ringan masih dapat mengandalkan media berbasis teks, dengan hambatan utama pada aksesibilitas fisik TPS, bukan pada konten informasi. Temuan ini sejalan dengan teori sosialisasi politik yang menegaskan bahwa pesan politik hanya efektif apabila saluran komunikasinya sesuai dengan kemampuan akses penerima pesan, sehingga ketidaksesuaian format media tetap dapat menimbulkan kesenjangan informasi meskipun materi sosialisasi telah tersedia.

Pada penyandang disabilitas Tuli/Rungu, informan Nur menyatakan bahwa akses informasi pemilu masih banyak diperoleh melalui media konvensional, seperti undangan yang disebarkan di lingkungan tempat tinggal, namun media yang paling membantu pemahamannya adalah Juru Bahasa Isyarat (JBI) dan gambar. Hambatan terbesar yang dihadapi adalah masih terbatasnya keberadaan JBI secara konsisten dalam kegiatan sosialisasi, meskipun Wuri menjelaskan bahwa KPU Kabupaten Bantul telah berupaya menghadirkan interpreter bahasa isyarat dan menyediakan subtitle pada konten video di media sosial sebagai bentuk pemenuhan aksesibilitas komunikasi. Implementasi aksesibilitas tersebut masih lebih dominan pada media digital dibandingkan kegiatan sosialisasi tatap muka secara langsung. Kebutuhan media yang teridentifikasi meliputi: (1) media berbasis gambar dan visual yang jelas dan representatif; (2) kehadiran JBI dalam setiap kegiatan sosialisasi tatap muka; (3) subtitle teks yang tersusun rapi dan tidak dalam bentuk *running text*; serta (4) kalimat yang singkat, padat, dan berbasis poin untuk menghindari ambiguitas pemaknaan. Andi menambahkan bahwa penyandang Tuli/Rungu cenderung mengalami kesulitan memahami informasi yang disampaikan melalui kalimat panjang dan kompleks, sehingga kebutuhan media bagi kelompok ini bersifat lebih kompleks daripada sekadar penyediaan informasi tertulis.

Pada penyandang disabilitas fisik/daksa, temuan menunjukkan bahwa hambatan utama bukan terletak pada kemampuan menerima informasi, melainkan pada aksesibilitas fisik di lokasi sosialisasi maupun di TPS. Kondisi ini berarti kelompok ini umumnya tidak memerlukan adaptasi format media yang bersifat khusus, namun sangat membutuhkan pemenuhan aksesibilitas fisik, seperti jalur masuk yang ramah kursi roda dan fasilitas pendukung lainnya, serta jalur sosialisasi yang bersifat proaktif dari pemerintah daerah dengan memanfaatkan data disabilitas yang telah tersedia di tingkat kelurahan.

Pada penyandang disabilitas psikologis/mental, ditemukan adanya perbedaan kebutuhan berdasarkan tingkat keparahan kondisi. Penyandang dengan tingkat keparahan

ringan dapat mengakses media sosial umum secara mandiri tanpa modifikasi khusus, sementara penyandang dengan tingkat keparahan yang lebih tinggi memerlukan pendampingan intensif dari orang-orang terdekat yang memiliki hubungan emosional dengan individu tersebut, serta media yang sangat sederhana berbasis gambar konkret. Untuk penyandang disabilitas intelektual dan mental, Wuri menjelaskan bahwa KPU Kabupaten Bantul menerapkan strategi pendampingan keluarga, di mana keluarga berfungsi sebagai fasilitator komunikasi yang menjelaskan kembali materi sosialisasi dengan bahasa yang lebih sederhana, kontekstual, dan sesuai tingkat pemahaman anggota keluarga yang memiliki disabilitas.

Keterbatasan akses primer terhadap informan disabilitas intelektual sebagaimana dijelaskan pada bagian metode, temuan mengenai kelompok ini bersumber dari keterangan Andi, Wuri, guru SLB, dan orang tua pendamping. Keterangan tersebut secara konsisten menunjukkan bahwa tingkat penerimaan informasi pada penyandang disabilitas intelektual tidak bersifat seragam, bergantung pada kondisi kognitif masing-masing individu, sehingga memerlukan metode penyampaian yang lebih sederhana, berulang, konkret, dan disertai contoh nyata. Penyederhanaan bahasa secara ekstrem, penggunaan media bantu visual seperti gambar atau alat peraga, serta kesabaran dan pendampingan intensif menjadi faktor kunci agar komunikasi dapat berjalan efektif bagi kelompok ini, mengingat usia kronologis dewasa tidak selalu berbanding lurus dengan tingkat perkembangan kognitif yang dimiliki.

Dari perspektif penyelenggara pemilu, Wuri menjelaskan bahwa KPU Kabupaten Bantul telah melakukan berbagai upaya inklusif, antara lain sosialisasi melalui komunitas hingga tingkat kapanewon dan kalurahan, kehadiran interpreter bahasa isyarat, produksi konten audio visual bersubtitle, penyediaan surat suara braille untuk kategori tertentu, serta pendampingan keluarga bagi penyandang disabilitas intelektual dan mental. Namun demikian, implementasi upaya tersebut belum dilakukan secara konsisten pada seluruh kegiatan sosialisasi dan belum didukung oleh pemetaan media per ragam disabilitas, riset efektivitas, maupun strategi komunikasi yang berbasis analisis kebutuhan secara sistematis, sehingga masih terdapat kesenjangan antara kebijakan dan kebutuhan aktual pemilih difabel di lapangan.

Analisis lebih lanjut terhadap keseluruhan temuan menunjukkan empat pola utama. Pola pertama adalah aksesibilitas format media berdasarkan ragam disabilitas, di mana setiap ragam disabilitas memiliki karakteristik komunikasi dan kebutuhan aksesibilitas media yang khas dan tidak dapat diseragamkan. Pola kedua adalah ketergantungan pada saluran komunitas, di mana komunitas difabel seperti CIQAL dan HIDIMU Bantul menjadi saluran komunikasi politik yang paling efektif sekaligus berfungsi sebagai mediator dan opinion leader, namun pola ketergantungan ini menciptakan risiko eksklusi informasi bagi penyandang disabilitas

yang tidak tergabung dalam organisasi. Pola ketiga adalah aksesibilitas fisik sebagai hambatan nyata yang memengaruhi partisipasi tidak hanya pada saat pemungutan suara, tetapi juga sejak tahap penerimaan sosialisasi, sekaligus memiliki dimensi simbolik terhadap perasaan diakui sebagai warga negara yang memiliki hak politik setara. Pola keempat adalah kesenjangan antara kebijakan dan praktik lapangan, yang disebabkan oleh belum adanya pemetaan media per ragam disabilitas, riset efektivitas, dan strategi komunikasi berbasis analisis kebutuhan yang sistematis.

Dikaitkan dengan kerangka teoretis, temuan ini memperkuat teori sosialisasi politik yang menegaskan bahwa proses pembentukan pengetahuan dan pemahaman politik hanya dapat berlangsung optimal apabila pesan politik disampaikan melalui saluran komunikasi yang dapat diakses dan dipahami oleh khalayak sasaran. Dalam perspektif teori partisipasi politik, temuan menunjukkan bahwa media sosialisasi merupakan faktor penting yang menjembatani hak politik secara normatif dengan praktik partisipasi politik secara nyata; rendahnya partisipasi pemilih difabel di Kabupaten Bantul yang berada pada kisaran 32,42–33,00% lebih disebabkan oleh hambatan struktural dalam aksesibilitas sosialisasi dan TPS daripada kurangnya motivasi pemilih, sebagaimana dikonfirmasi oleh antusiasme tinggi informan untuk berpartisipasi ketika difasilitasi dengan baik. Dari sisi peran komunikasi politik penyelenggara pemilu, efektivitas komunikasi KPU tidak hanya ditentukan oleh isi pesan, tetapi juga oleh kesesuaian media, format, dan saluran komunikasi dengan karakteristik kebutuhan setiap ragam disabilitas.

Temuan penelitian ini sejalan dengan sekaligus memperluas penelitian terdahulu. Rengganis et al. (2021) menjelaskan bahwa problematika pemilih penyandang disabilitas dalam pemilihan serentak masih berkaitan dengan rendahnya aksesibilitas dan pendidikan pemilih; temuan ini sejalan dengan hasil penelitian di Kabupaten Bantul, namun penelitian ini memberikan kebaruan berupa identifikasi kebutuhan yang lebih terperinci per ragam disabilitas, yakni kebutuhan audio dan kompatibilitas *TalkBack* bagi disabilitas netra total, media berbasis teks dengan perhatian pada aksesibilitas fisik bagi netra ringan, kehadiran JBI dan *subtitle* terstruktur bagi Tuli/Rungu, aksesibilitas fisik bagi disabilitas daksa, pendampingan berjenjang bagi disabilitas psikologis, serta media bergambar dengan bahasa *easy-read* bagi disabilitas intelektual. Amrurobbi et al. (2021) menekankan pentingnya komunikasi intensif antara penyelenggara pemilu dengan komunitas difabel; penelitian ini menemukan dimensi tambahan, yaitu bahwa ketergantungan pada komunitas justru menciptakan risiko eksklusi informasi bagi penyandang disabilitas yang tidak tergabung dalam organisasi. Alemande et al. (2024) menekankan bahwa aksesibilitas pemilu harus dipahami

secara menyeluruh, mencakup akses fisik maupun akses komunikasi; temuan ini diperkuat oleh hasil penelitian ini yang memperlihatkan hambatan ganda, yaitu hambatan fisik yang dialami penyandang daksa dan netra ringan, serta hambatan komunikasi yang dialami penyandang netra total dan Tuli/Rungu. Alam et al. (2024) menjelaskan bahwa partisipasi pemilih penyandang disabilitas sangat dipengaruhi oleh keterjangkauan informasi politik; temuan ini dikonfirmasi secara empiris oleh antusiasme partisipasi informan ketika difasilitasi dengan baik.

Berdasarkan keseluruhan analisis temuan dan keterkaitan dengan kerangka teoretis, penelitian ini merumuskan rekomendasi media sosialisasi pendidikan pemilih sebagai berikut. Bagi pemilih penyandang disabilitas netra total, media yang direkomendasikan adalah media berbasis audio yang sepenuhnya kompatibel dengan *TalkBack* dan menghindari penggunaan *running text*, sedangkan bagi netra ringan media berbasis teks pada platform pesan instan dapat dipertahankan dengan tetap memastikan pemenuhan aksesibilitas fisik di lokasi sosialisasi dan TPS. Bagi pemilih Tuli/Rungu, setiap kegiatan sosialisasi tatap muka wajib menghadirkan JBI, konten video dilengkapi subtitle terstruktur, serta pesan disusun dalam kalimat singkat berbasis poin tanpa istilah formal yang kompleks. Bagi pemilih fisik/daksa, tidak diperlukan adaptasi format media khusus, namun setiap lokasi sosialisasi wajib memenuhi standar aksesibilitas fisik dan diperlukan jalur sosialisasi proaktif berbasis data kelurahan. Bagi pemilih psikologis, pendekatan dibedakan berdasarkan tingkat keparahan: media sosial umum bagi kondisi ringan, dan pendampingan intensif dengan media gambar konkret bagi kondisi yang lebih berat. Bagi pemilih disabilitas intelektual, berdasarkan data sekunder dan kajian literatur, direkomendasikan media bergambar sangat sederhana seperti pictogram dan komik bergambar, bahasa easy-read, serta pendampingan keluarga atau pendamping terlatih dengan pengulangan yang konsisten, disertai catatan bahwa penelitian lanjutan dengan data primer sangat diperlukan untuk memvalidasi rekomendasi ini. Rekomendasi lintas ragam disabilitas yang diajukan dalam penelitian ini, sejalan dengan usulan Wuri, adalah pengembangan format video inklusif satu format untuk semua (*one format for all*), yaitu video sosialisasi pemilu yang memadukan narasi audio yang jelas, teks atau subtitle terstruktur, visual yang representatif, serta JBI dalam satu layar secara bersamaan, sehingga KPU dapat menjangkau seluruh ragam disabilitas tanpa harus memproduksi media yang terpisah-pisah untuk setiap kelompok.

SIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa kebutuhan media sosialisasi pendidikan pemilih bagi penyandang disabilitas di Kabupaten Bantul bersifat heterogen dan tidak dapat

diseragamkan dalam satu format tunggal, karena setiap ragam disabilitas memiliki karakteristik komunikasi dan kebutuhan aksesibilitas yang berbeda, mulai dari kebutuhan audio yang kompatibel dengan *TalkBack* bagi penyandang netra total, media berbasis teks dengan perhatian pada aksesibilitas fisik bagi penyandang netra ringan, JBI dan subtitle terstruktur bagi penyandang Tuli/Rungu, aksesibilitas fisik bagi penyandang daksa, pendampingan berjenjang bagi penyandang psikologis, hingga media bergambar sederhana bagi penyandang intelektual, meskipun format video multimodal yang memadukan audio, visual, teks, dan JBI dalam satu format ditemukan sebagai pendekatan yang paling mendekati inklusif bagi seluruh ragam disabilitas. Komunitas difabel terbukti menjadi saluran komunikasi politik yang paling efektif, namun sekaligus menciptakan ketergantungan struktural yang berisiko mengeksklusi pemilih difabel yang tidak berorganisasi. Hambatan aksesibilitas fisik pada lokasi sosialisasi dan TPS merupakan hambatan nyata yang memengaruhi partisipasi secara menyeluruh, sementara kesenjangan antara upaya sosialisasi KPU Kabupaten Bantul dengan kebutuhan aktual pemilih difabel masih signifikan karena belum didukung pemetaan media, riset efektivitas, dan strategi komunikasi berbasis analisis kebutuhan yang sistematis. Rendahnya partisipasi pemilih difabel di Kabupaten Bantul pada Pemilu 2024, yang berada pada kisaran 32,42–33,00%, lebih disebabkan oleh hambatan struktural dalam aksesibilitas sosialisasi dan TPS daripada rendahnya motivasi pemilih itu sendiri.

Berdasarkan simpulan tersebut, disarankan kepada KPU Kabupaten Bantul untuk menyusun pemetaan media sosialisasi yang spesifik per ragam disabilitas, mengadakan forum evaluasi berkala bersama komunitas difabel, memastikan standar aksesibilitas fisik dan kehadiran JBI secara konsisten pada setiap kegiatan tatap muka, mengembangkan format video multimodal satu format untuk semua sebagai format andalan, serta memanfaatkan data disabilitas di tingkat kelurahan untuk sosialisasi yang lebih proaktif. Komunitas difabel disarankan memperkuat perannya sebagai simpul komunikasi pemilu dengan memastikan informasi diteruskan kepada seluruh anggota, termasuk yang tidak aktif berorganisasi, serta mendokumentasikan hambatan aksesibilitas secara sistematis sebagai masukan berbasis bukti bagi KPU. Penelitian selanjutnya disarankan untuk melaksanakan kajian khusus mengenai kebutuhan media sosialisasi bagi penyandang disabilitas intelektual dengan data primer yang melibatkan wali atau pendamping terlatih, mengembangkan penelitian evaluatif yang mengukur efektivitas media sosialisasi secara kuantitatif, memperluas cakupan kepada penyandang disabilitas yang tidak tergabung dalam komunitas, serta memperluas cakupan wilayah penelitian guna menghasilkan analisis komparatif yang lebih komprehensif sebagai dasar rekomendasi kebijakan pemilu inklusif yang lebih luas.

REFERENSI

- Alemade, D., Ummah, S. M., Priyanto, A. S., & Ms, S.-M. (2024). *Accessibility of Political Participation for Different Ability in The 2024 General Election in DKI Jakarta*. *Unnes Political Science Journal*, 8(2), 78–84.
- Amrullohi, A. A., Pahlevi, M. E. T., & Kalpiando, R. (2021). Tantangan Pemilih Difabel dalam Pelaksanaan Pemilihan Serentak 2020 di Tengah Pandemi Covid-19.
- Fatimah, A. A. (2020). *Student Edited Law Journals: Strengthening the Creativity of Law Students in a Challenging Era*. *Journal of Creativity Student*, 7(2), 133–154.
<https://doi.org/10.15294/jcs.v7i2.38493>
- Galih Priatmojo. (2025). Partisipasi Politik Difabel DIY Anjlok: Kurangnya Akses Informasi Jadi Penghambat Utama. Populi.Id.
- Herman, M., & Adnan, M. F. (2024). Partisipasi Politik Penyandang Disabilitas Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 (Studi Pada Komisi Pemilihan Umum Kota Padang). *Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora*, 4(1), 16.
<https://doi.org/10.53697/iso.v4i1.1821>
- Husin, W. L., Arsjad, Muh. F., Tabo, S., & Loupode, N. (2023). 311-Article Text-908-1-10-20230528. *Governance and Politics*, 3, 1–13.
- Kaharu, H. N., Suleman, D., Djaafar, L., & Wantu, S. M. (2025). Pemilu dan Partai Politik: Menuju Demokrasi yang Berkualitas. *Jurnal Penelitian Ilmu Sosial Dan Eksakta*, 4(2), 146–161. <https://doi.org/10.47134/trilogi.v4i2.1526>
- Putra, E. M. (2025). Konsep Umum Penelitian Kualitatif pada Ranah Pendidikan. *Dahzain Nur*, 15(1), 10–17. <https://doi.org/10.69834/dn.v15i1.282>
- Putri, H. J., & Murhayati, S. (2025). Metode Pengumpulan Data Kualitatif.
- Rengganis, V. M. S., Sidiki, H. I., Saputra, F., & Damarjati, W. (2021). Problematika Partisipasi Pemilih Penyandang Disabilitas dalam Pemilihan Serentak Lanjutan 2020.
- Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif* (S. Y. Suryandari, Ed.; 3rd ed.). ALFABETA CV.
- Yudha Alam, W., Puspa Anggraini, A., Dwijayanti, R., & Zulvamita Anggraini, R. (2024). *The Influence of Political Awareness on the Electoral Participation of Voters with Disabilities in Indonesia*. <http://jurnaldialektika.com/>